



Warga Minta Bangunan Dibongkar

YOGYA. TRIBUN - Warga Balirejo, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo yang menolak pembangunan apartemen mengeruduk kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Rabu (3/5) sore ini.

Mereka mendesak aparat penegak Perda ini menindak tegas pengembang apartemen tak berizin tersebut dengan menghentikan aktivitas pembangunan.

Sebelum mengeruduk kantor Sat Pol PP, warga juga sempat beraudansi

di kantor Forum Penantau Independen (Forpi) setempat. Mereka juga menyatakan sudah satu suara untuk menolak apartemen itu.

Membawa poster bertuliskan "Warga Balirejo Menolak Pembangunan Apartemen", "Jaga Air Jaga Tanah Tolak Apartemen", "Stop Pembangunan Apartemen", mereka datang ke kantor aparat penegak Perda di kompleks balai kota setempat.

Kedatangan kami ke Sat Pol PP untuk mengklarifikasi rencana pembangunan apartemen di kawasan itu. Apakah Sat Pol PP sudah menindak, karena warga jelas-jelas menolak pembangunan apartemen tak berizin itu

Warga Minta Bangunan

• Sambungan Hal 13

"Kedatangan kami ke Sat Pol PP untuk mengklarifikasi rencana pembangunan apartemen di kawasan itu. Apakah Sat Pol PP sudah menindak, karena warga jelas-jelas menolak pembangunan apartemen tak berizin itu," jelas Ketua RW 05 Balirejo, Dono Susilo.

Dia menjelaskan, jika tidak ada izin sudah seharusnya Sat Pol PP bisa menindak tegas pengembang. Termasuk, membongkar bangunan yang sudah dilaksanakan oleh pengembang.

"Para PKL yang juga warga kami pun sudah disita paung dan tabung gasnya oleh Sat Pol PP. Ini Sat Pol PP juga harus berani menyita back hoe pengembang, bukan hanya rakyat kecil saja," jelasnya.

Jaga kampung
Menurut Susilo, jika pemerintah kota tidak tegas

dan membiarkan aktivitas pembangunan, maka akan semakin memperkeruh suasana. Selain itu, dampak sosial juga akan semakin timbul. Hal ini lantaran ada kesan warga pro dan kontra pada pembangunan tersebut.

"Kami ingin menjaga kampung kami agar tetap nyaman dan kondusif, jangan sampai warga terpecah belah. Maka, harus ada tindakan hukum yang tegas," tegasnya.

Joko Susilo, warga Balirejo juga mengatakan, warga sempat resah dengan rencana pembangunan apartemen tersebut. Pasalnya, dampak yang dirasakan oleh warga antara lain adalah dampak lingkungan dan sosial.

"Kami khawatir sumur kami debitnya bisa berkurang. Selain itu, ada dampak sosial lainnya," paparnya.

Dia juga menyebut adanya dampak lalu lintas karena jalan lokasi proyek apartemen tergolong jalan kam-

pung yang sempit. Sehingga, rawan timbul kemacetan. Tak hanya itu, limbah yang dibuang pun akan berdampak mencemari sungai Gajah Wong di sekitar lokasi.

Legal
Divisi Kajian Forpi Kota Yogya, FX Harry Cahyo menyatakan, pemerintah kota harus menindak tegas proyek apartemen ini. Hal ini lantaran pengembang proyek tersebut telah mendirikan bangunan tanpa izin.

Dari inspeksi mendadak yang dilakukan Forpi pekan lalu, pihaknya mendapati aktivitas pekerja dan menemukan infrastruktur pendukung apartemen yang sudah dibangun. Di antaranya sumur resapan, pagar, konstruksi baja, dan gedung kantor pemasaran.

"Tidak seharusnya ada pembangunan. Karena dari pihak penanggung jawab menyatakan proses pertizinan ternyata baru sampai tahap awal kajian amdal oleh Dinas Lingkungan Hidup. Artinya kan proses melengkap pertizinan masih jauh,

dokumen amdal itu, salah satu syarat pengajuan IMB," jelasnya.

Forpi pun telah memberi rekomendasi pada Sat Pol PP agar menindak tegas proyek tersebut. Warga, kata dia, juga sudah menyerahkan petisi berisi tanda tangan warga untuk penolakan apartemen tersebut.

Urus Izin
Satu perwakilan penanggungjawab proyek apartemen yang bakal dinamai Apartemen Puri Notoprojo, Mahendra sebelumnya mengklaim belum ada aktivitas pembangunan apartemen karena masih dalam tahap mengurus pertizinan. Dia juga membantah jika apartemen yang akan dibangun ini berlantai 13.

Mahendra menjelaskan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada warga terkait rencana pembangunan apartemen tersebut selama tiga kali. Dalam sosialisasi itu dihadiri oleh camat, Polsek, dan juga warga. Hanya, dia tidak menyebut ada penolakan dari warga. (ais)

- Sat. Pol. PP - Din. PM dan Perizinan - Klaten

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Muja-Muju 2. Forpi 3. Sat Pol PP 4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005